

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb

Allhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nyajualah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kota Cimahi dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2019 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan tertinggi. Bagi kami sendiri dokumen ini juga merupakan dokumen yang sangat penting dalam siklus perencanaan dalam memberikan umpan balik bagi penyusunan rencana strategic dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja tahun-tahun berikutnya. Dokumen ini juga merupakan pertanggungjawaban hasil kinerja atas penggunaan anggaran Negara sehingga dapat menjadi instrument untuk menilai efektifitas, efisiensi dan produktifitas instansi.

Melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2019, Dinas Perhubungan Kota Cimahi melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategi Dinas Perhubungan Kota Cimahi 2017-2022 dan Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2019.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2019 masih dijumpai adanya kekurangan, namun diharapkan Laporan Kinerja ini menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi Dinas Perhubungan dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang dan dapat

memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kekurangan Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2019. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Cimahi, Februari 2020
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIMAHI



Drs. YANUAR TAUFIK, M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19640121 199102 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		v
RINGKASAN EKSEKUTIF		vi
 BAB I PENDAHULUAN		 1
1.1. LATAR BELAKANG		1
1.2. DASAR HUKUM		2
1.3. TUGAS & FUNGSI		4
1.4. PERMASALAHAN & ISSUE STRATEGIS		5
1.5. URAIAN SINGKAT ORGANISASI		8
 BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA		
 CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2019		11
2.1. RENCANA STRATEGIS 2017– 2022		11
2.1.1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Cimahi		11
2.1.2. Tujuan dan Sasaran		13
2.1.3. Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran)		13
2.1.4. ArahKebijakan		14
2.1.5. Program Dinas Perhubungan Kota Cimahi		16
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019		16
2.2.1. Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi		
Tahun 2019		16

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN	18
	KOTA CIMAHI TAHUN 2019	
3.1.	CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019	18
3.1.1	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019	19
3.1.2	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dan realisasi kinerja tahun sebelumnya	21
3.1.3	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis	21
3.1.4	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	22
3.1.5	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	23
3.1.6	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	23
3.2	Realisasi Anggaran Tahun 2019	35
BAB IV	PENUTUP	39
 LAMPIRAN – LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	15
TABEL 2.2	TUJUAN DAN SASARAN	15
TABEL 2.3	PERJANJIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI TAHUN 2019	17
TABEL 3.1	TARGET DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2019	36
TABEL 3.2	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI TAHUN 2019	36

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Kota Cimahi adalah Lembaga Teknis Daerah berbentuk Dinas dan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan, dengan tugas pokoknya adalah membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang Perhubungan.

Dalam Tahun Anggaran 2019 Dinas Perhubungan Kota Cimahi telah membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dengan 6 program dan 37 kegiatan. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh hasil pencapaian sasaran indikator Dinas Perhubungan Kota Cimahi tahun 2019, sebagai berikut :

Indikator Sasaran	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian Kinerja 2019
Tingkat Kelancaran Lalu Lintas (VCR)	D	C	0.64

Berdasarkan rata-rata hasil Traffic Counting di beberapa ruas jalan di Kota Cimahi didapatkan hasil type Pelayanan C dengan LOS = 0,64 (Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan. Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan). Pencapaian Kinerja Tahun 2019 melebihi target.

Pencapaian sasaran indikator kegiatan Dinas Perhubungan Kota Cimahi pada tahun anggaran 2019, rata-rata mencapai 95,64% dan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 28.672.195.000,- Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp. 24.893.442.640,- atau 86,82% dengan sisa pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 3.778.752.360,-.

Dari hasil evaluasi dan analisis efisiensi dan efektifitas kinerja kegiatan dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi telah dilaksanakan dengan efisien dan efektif.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu prasyarat terciptanya Pemerintahan yang baik dan terpercaya, dibutuhkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi dari program dan kegiatan dari unit kerja yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKIP Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada Dinas Perhubungan atas penggunaan seluruh sumber daya yang melibatkan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran Tahun Anggaran 2019. LKIP Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2019 menyajikan gambaran secara transparan atas capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2019 sebagai upaya strategis yang optimal dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi.

Guna mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan Sasaran Strategis, dilakukan pengukuran kinerja, dimana capaian kinerja Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan rencana kinerja (target kinerja) Tahun Anggaran 2019, sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Cimahi, serta dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2019 terhadap rencana kinerja, akan dapat ditemukan sejumlah celah kinerja (performance gap) guna perbaikan kinerja di masa mendatang

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Cimahi selaku perangkat daerah Pemerintah Kota Cimahi diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas akan memberi gambaran suatu tingkat ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk mengevaluasi kinerja, keterbukaan dalam pembuatan keputusan, mengacu kepada jadwal yang telah ditetapkan guna menerapkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran biaya.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Dinas Perhubungan Kota Cimahi :

1. Ketetapan MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016).
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 226), tanggal 18 Desember 2017;

15. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);
16. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cimahi;
17. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 382);
18. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 383), tanggal 18 Desember 2017.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kota Cimahi.

<u>TUGAS POKOK</u> <u>Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perhubungan</u>	<u>FUNGSI</u> 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan. 2. Perumusan Perencanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan. 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan. 4. Pengawasan dan pembinaan tugas bidang perhubungan 5. Pengelolaan administrasi kesekretariatan. 6. Pelaksanaan tugas lain yang
---	--

1.4.1 Permasalahan atau Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Pada perencanaan pembangunan tahun 2017-2022 dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Cimahi, meliputi permasalahan sosial budaya, ekonomi, infrastruktur kota dan permasalahan pemerintahan yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi adalah :

1. Rendahnya keamanan, kenyamanan dan keselamatan bertransportasi
2. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi
3. Terbatasnya prasarana jalan dan perlengkapan jalan (rambu, marka, dll)
4. Perlunya penataan sarana angkutan umum
5. Penggunaan badan jalan diluar kepentingan lalu lintas (PKL, Parkir, dll)
6. Volume pergerakan kendaraan dan orang yang cukup tinggi
7. Belum optimalnya penataan ruas jalan dan persimpangan untuk mendukung pergerakan kendaraan
8. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan tertib lalu lintas
9. Belum optimalnya penegakan hukum bagi pelanggaran lalu lintas

Permasalahan utama di bidang transportasi yang masih dihadapi di Kota Cimahi adalah persoalan rendahnya *Level of Service* (LoS). Minimnya sarana dan prasarana transportasi pengurai kemacetan menyebabkan arus lalu lintas terhambat dan tidak optimal.

Jalan dengan status jalan kota di Kota Cimahi merupakan peningkatan status jalan dari jalan kecamatan, sehingga kapasitas yang ada sebenarnya belum dapat menampung jumlah kendaraan yang melintas. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas Jalan di Kota Cimahi masih rendah.

Selain permasalahan kapasitas jalan, Kota Cimahi juga belum memiliki jalan lingkar selatan sebagai akses alternatif bagi kendaraan lintas kota yang melintasi Kota Cimahi. Oleh karena itu, kendaraan antar kota masih melewati dalam kota Kota Cimahi dan berimbas pada semakin macetnya lalu lintas dalam kota. Selain karena belum adanya jalan lingkar selatan diketahui juga bahwa masih rendahnya ketersediaan jalan alternatif sebagai pengurai kemacetan dari timur ke barat (padalarang ke Bandung). Adanya perlintasan sebidang dengan kereta api di daerah Gatot Subroto dan Sriwijaya juga menambah tingkat kemacetan di Kota Cimahi.

Saat ini Kota Cimahi hanya memiliki 3 terminal tipe C. Kelas terminal tersebut hanya melayani angkutan umum dengan rute dalam perkotaan atau pedesaan. Sementara itu, dengan kondisi geografis yang strategis sebagai wilayah transit sekaligus rute angkutan umum yang sangat aktif bagi angkutan umum dari Bandung Barat maupun Kota Bandung.

Kota Cimahi seharusnya sudah memiliki prasarana terminal antar kota dalam provinsi. Saat ini, terdapat 16 Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di wilayah perbatasan antara Kota Cimahi, Bandung dan Bandung barat yang harus dilayani. Akan tetapi, sampai saat ini belum tersedia terminal tipe B.

Angkutan umum yang melalui Kota Cimahi hanya diakomodasi oleh *pull/counter bus* di pinggir-pinggir jalan arteri sehingga mengurangi LoS.

Ketersediaan dan kapasitas terminal tipe c yang tersedia saat ini juga masih kurang memadai. Terminal Pasar Atas masih dalam kondisi rusak paska kebakaran dan sampai saat ini belum direhabilitasi. Kapasitas terminal lain tidak sepadan dengan jumlah arus penumpang dan frekuensi angkutan umum yang melalui terminal. Akibatnya, banyak titik-titik penumpukan angkutan di luar area terminal.

Sementara itu, jumlah angkutan umum cenderung meningkat sejak tahun 2012 lalu. Oleh karena itu, kebutuhan prasarana perhubungan di Kota Cimahi bukan hanya persoalannya tidak tersedianya terminal antar

kota dalam provinsi saja, akan tetapi kapasitas terminal yang ada harus ditingkatkan agar dapat mengikuti perkembangan mobilisasi lalu-lintas di masa datang.

Selain jumlah angkutan umum yang cenderung meningkat, persoalan lain yang masih dihadapi adalah belum optimalnya fasilitas perhubungan jalan. Beberapa radius tikung harus ditingkatkan kapasitasnya seperti memperjelas rambu-rambu, memfasilitasi speed-bumper dan kelengkapan lainnya. Hal tersebut penting untuk diupayakan untuk mengurangi tingkat kemacetan serta meminimalisir resiko kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di beberapa kawasan seperti di Jl. Cihanjuang, Jl. HMS Mintareja-Baros, serta radius tikung lainnya yang rawan kemacetan dan kecelakaan.

1.4.2 Issue Strategis

Isu isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

- Tingkat kemacetan yang perlu penanganan secara intens
- Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat pengguna jasa transportasi
- Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang belum memadai baik kualitas maupun kuantitas.
- Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi.
- Peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Perhubungan Kota Cimahi disertai peningkatan fasilitas pendukungnya (sarana dan prasarana aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan di bidang transportasi.
- Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan dan penanganan serta penertiban parkir liar.

- Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang yang berbasis IT disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang berteknologi tinggi.

Berdasarkan isu-isu strategis yang ada, maka isu strategis yang paling dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan perlu penanganan segera dan intens yaitu **masalah kemacetan**, dimana kemacetan di Kota Cimahi sangat tinggi pada jam tertentu dan ruas jalan tertentu (Jalan nasional) yang mengakibatkan kemacetan ke jalan lokal. Masalah kemacetan bisa mengakibatkan waktu tempuh menjadi lama, kesemerawutan bahkan mengakibatkan terjadinya banyak kecelakaan.

1.4.3 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Peluang dalam kurun 5 tahun kedepan antara lain :

1. Pengembangan konsep sistem transportasi massal (Mass Transport) berbasis busline dan cable car atau monorel bersama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat (sesuai RTRW 2012-2032).
2. Konsep Terminal Terpadu yang memadukan moda transportasi kereta api dan Terminal di Kota Cimahi.

1.5. URAIAN SINGKAT ORGANISASI

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

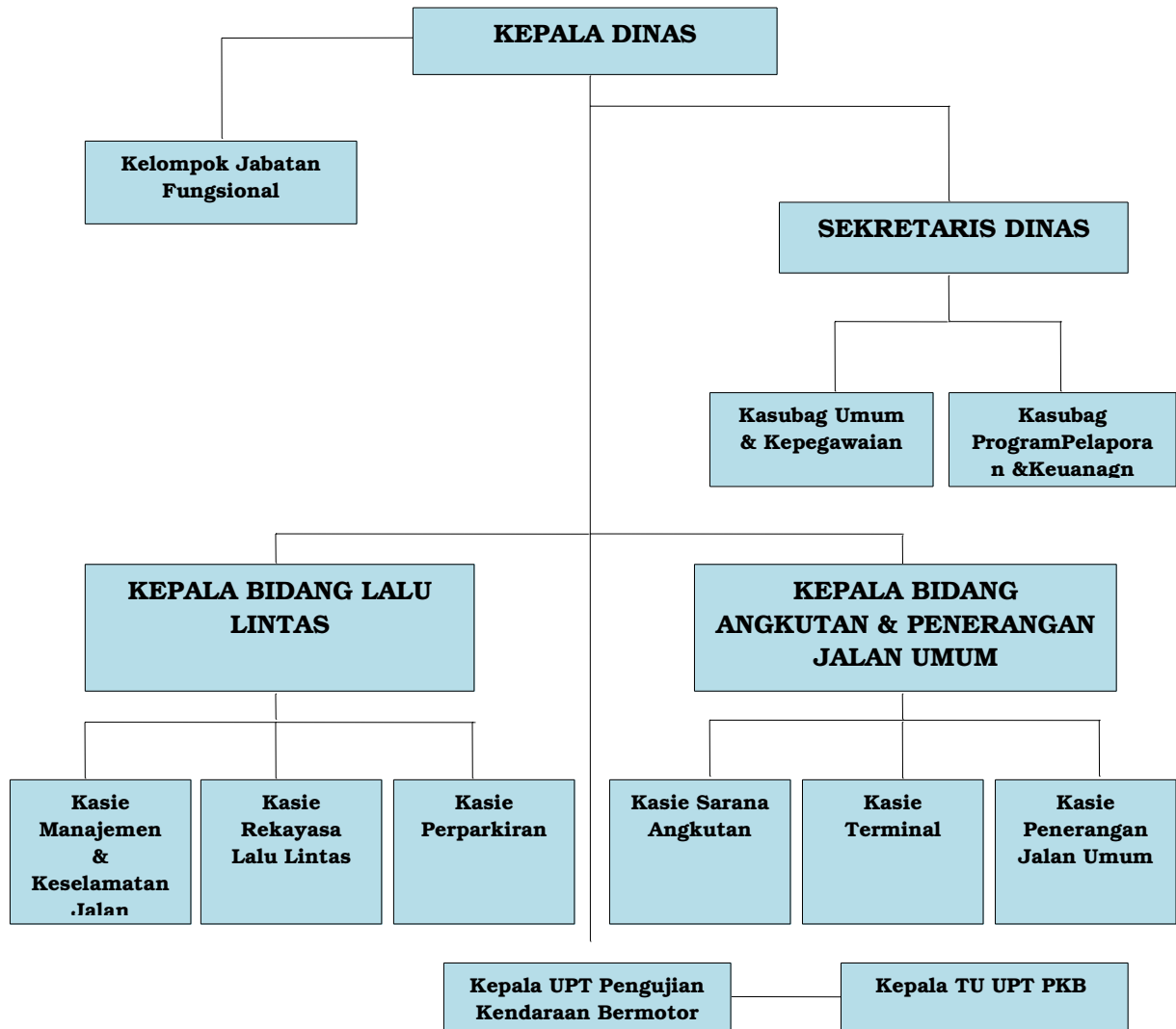
Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016). Perangkat Daerah dibentuk dengan memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas perhubungan kota cimahi mempunyai typelogi dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perhubungan, dengan susunan organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Program Pelaporan dan Keuangan
3. Kepala Bidang Angkutan dan Penerangan Jalan Umum, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Terminal
 - b. Kepala Seksi Sarana Angkutan
 - c. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum
4. Kepala Bidang Lalu Lintas, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Manajemen Keselamatan Lalu Lintas
 - b. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas
 - c. Kepala Seksi Perparkiran
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor
 - a. Kasubag TU Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4.1
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cimahi



BAB II

PERENCANAAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI

TAHUN ANGGARAN 2019

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Melalui berbagai kegiatan tahunan dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Dinas Perhubungan Kota Cimahi untuk mencapainya pada Tahun 2019.

2.1 RENCANA STRATEGIS 2017-2022

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2017-2022 tentunya berpedoman pada RPJMD 2017-2022 yang telah ditetapkan. seiring dengan berjalannya waktu, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Cimahi tahun 2017-2022 perlu diadakan revisi untuk lebih menajamkan dan menyesuaikan kebutuhan daerah dan organisasi untuk menuju ke arah yang lebih berhasil guna, berdaya guna, transparan, dan akuntabel.

2.1.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Cimahi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

VISI

“ TERWUJUDNYA TRANSFORTASI YANG ANDAL “

Penetapan visi ini didasarkan untuk memberikan rasa aman, nyaman, tertib, lancar, berkeselamatan kepada masyarakat.

ANDAL, yaitu dapat menjamin bahwa Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam penyelenggaraan transfortasinya dapat memberikan rasa aman, nyaman, lancar, berkeselamatan berdasarkan prinsip :

- Berkeadilan
- Keterjangkauan
- Berwawasan lingkungan

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, telah disusun Misi Dinas yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan/program Dinas ingin dicapai. Misi Dinas Perhubungan Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

<u>MISI</u>	
a.	Meningkatkan Penyelenggaraan Angkutan Umum. • Tujuan : Terselenggaranya pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman dan berkeselamatan • Sasaran : Meningkatkan akseibilitas pelayanan transfortasi
b.	Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas. • Tujuan : Terselenggaranya lalu lintas yang tertib dan lancar • Sasaran : Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan : sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai Implementasi dari Misi Dinas.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang efektif. Berdasarkan isu strategis, Sasaran yang ingin dicapai Kota Cimahi adalah **tingkat pelayanan jalan (LOS)**, sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi **Meningkatkan kelancaran lalu lintas**. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan transportasi

Kelancaran lalu lintas harus didukung dengan peningkatan sarana prasarana penunjang transportasi baik kuantitas maupun kualitas, titik kemacetan maupun simpul kemacetan bisa diatasi, peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang berbasis IT dengan penggunaan peralatan pengujian yang berteknologi tinggi, dan pelaksanaan sosialisasi maupun penegakan hukum

- b. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas

Kelancaran dan keselamatan lalu lintas harus didukung dengan sarana prasarana penunjang transportasi, titik kemacetan maupun simpul kemacetan bisa diatasi, dan terjadinya penurunan kawasan rawan kecelakaan.

2.1.3 Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran)

Strategi yaitu keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi yang akan dilakukan Dinas Perhubungan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (lalu lintas dan angkutan jalan).
2. Meningkatkan pengendalian dan pengamanan lalu lintas angkutan jalan
3. Meningkatkan pelayanan angkutan

2.1.4 Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam mewujudkan visi misi maupun sasaran strategis serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan, maka sebagai pedoman/petunjuk Dinas Perhubungan Kota Cimahi telah menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan
2. Peningkatan sarana prasarana perparkiran
3. Pengujian Kendaraan Bermotor.
4. Peningkatan kualitas Alat Uji.
5. Rekayasa Lalu Lintas.

6. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengamanan Lalu Lintas.
7. Meningkatkan Angkutan Penumpang dan Barang.

TABEL 2.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	1. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (lalu lintas dan angkutan jalan) 2. Meningkatkan pengendalian dan pengamanan lalu lintas angkutan jalan 3. Meningkatkan pelayanan angkutan	1. Peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan 2. Peningkatan sarana prasarana perparkiran 3. Pengujian Kendaraan Bermotor 4. Peningkatan kualitas Alat Uji 5. Rekayasa Lalu Lintas 6. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengamanan Lalu Lintas 7. Meningkatkan Angkutan Penumpang dan Barang

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Perhubungan 5 (lima) tahun ke depan disajikan dalam tabel 2.2

Tabel 2.2

TUJUAN DAN SASARAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kelancaran Lalu Lintas	Meningkatnya kelancaran Lalu Lintas	Tingkat Kelancaran Lalu Lintas (VCR)	D	D	D	D	C

2.1.5 Program Dinas Perhubungan Kota Cimahi

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2022 Kota Cimahi, Dinas Perhubungan Kota Cimahi didukung oleh beberapa program yang termuat dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan Permendagri 21 Tahun 2011, sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas.
2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
3. Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Angkutan
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010, Dinas Perhubungan Kota Cimahi telah menyusun perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam laporan Penetapan Kinerja (PK).

2.2.1 Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2019

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Cimahi setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) berisi penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Target dari indikator kinerja kegiatan ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing indikator. Satuan ditetapkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan dari masing-masing program dan kegiatan.

Dinas Perhubungan Kota Cimahi telah menetapkan beberapa penetapan seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan dokumen berisi sasaran strategis, target dan program serta anggaran untuk tahun 2019, sebagaimana terlihat pada Tabel dibawah ini :

TABEL 2.3

**PERJANJIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI
TAHUN 2019**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	Tingkat Kelancaran Lalu Lintas (VCR)	D

Adapun jumlah program dalam perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2019 ini sebanyak 6 Program dan 37 Kegiatan dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 28.672.195.000,-, dengan uraian sebagai berikut :

No	Program	Anggaran
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas.	Rp. 12.405.816.350,-
2	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.	Rp. 2.535.239.500,-
3	Peningkatan Pelayanan dan Sarana	Rp. 1.795.577.682,-

	Prasarana Angkutan	
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Rp. 11.262.116.350,-
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Rp. 327.596.200,-
6	Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara.	Rp. 345.849.918,-
JUMLAH		Rp 28.672.195.000,- . -

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI TAHUN 2019

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2019 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2022, dan dituangkan lebih lanjut pada Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2019. Selain itu dibahas akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Dinas Perhubungan Kota Cimahi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi.

Pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, diharapkan dapat memperbaiki kinerja instansi Dinas Perhubungan dan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam menyiapkan/menyusun perencanaan strategis, penganggaran dan monitoring evaluasi program dan kegiatan, sehingga terdapat keselarasan kinerja antara perencanaan dan penganggaran.

3.9.1. CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja tahun 2019 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 juga menguraikan tentang penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang tidak dapat dicapai.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja digunakan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi yang difokuskan pada capaian sasaran. Sedangkan evaluasi dan analisis terhadap kegiatan lebih terfokus untuk menilai efisiensi dan efektivitas. Kesimpulan atas hasil evaluasi kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja setiap indikator kinerja yang dilakukan terhadap capaian kinerja setiap indikator kinerja yang ada dengan perhatian utama diberikan kepada indikator kinerja kunci. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan, yaitu Tingkat Kelancaran Lalu Lintas (VCR)

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian Kinerja 2019
Tingkat Kelancaran Lalu Lintas (VCR)	D	C	0.64

Berdasarkan rata-rata hasil Traffic Counting di beberapa ruas jalan di Kota Cimahi didapatkan hasil type Pelayanan C dengan VCR = 0,64 (Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan. Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan). Pencapaian Kinerja Tahun 2019 melebihi target.

**Tingkat Pelayanan Jalan/Level Of Service (LOS)
Dengan menggunakan nilai VCR
Di beberapa Ruas Jalan di Kota Cimahi**

No	Nama Ruas Jalan	VCR
1	Simpang Sangkuriang-Amir Machmud	0,76
2	Jl. Kolonel Masturi	0,52
3	Simpang Pemerintahan Kota Cimahi/Jl. Rd. Demang Hardjakusumah	0,58
4	Cihanjuang	1,02
5	Jl. Gatot Subroto	0,32
6	Jl. Contong	0,62
7	Jl. Baros	0,70
8	Simpang Leuwigajah	0,85
9	Cimindi/Jl. Mahar Martanegara	1,17
10	Kebon Kopi-Jl. Amir Machmud	0,79
11	Jl. Melong	0,33
12	Jl. Industri	0,04
Rata- Rata VCR :		0,64

Karakteristik Tingkat Pelayanan

Tingkat Pelayanan	Karakteristik-karakteristik	Kecepatan (Km/Jam)	Batas Lingkup (V/C)
A	Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan	>50	0.00 - 0.20
B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk pengemudi memilih kecepatan	40-50	0.21 – 0.44
C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan. Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan	32-40	0.45 – 0.74
D	Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dapat ditolerir	27-32	0.75 – 0.84
E	Volume lalu lintas mendekati/berada pada	24-27	0.85 – 1.00

	kapasitas. Arus tidak stabil kecepatan terkadang terhenti		
F	Arus yang dipaksakan atau macet, kecepatan rendah, volume di bawah kapasitas, antrian panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang besar	<24	>1.00

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	2018			2019		
Tingkat Kelancaran Lalu Lintas (VCR)	D	C	0.59	D	C	0,64

Tahun 2019 Type Pelayanan sama dengan Tahun 2018. Pada Tahun 2018 Type pelayanannya C dengan VCR = 0,59 sedangkan pada tahun 2019 tetap C dengan VCR = 0,64, meskipun berada pada Tingkat pelayanan C tetapi rangenya menurun dikarenakan ada titik-titik kemacetan yang kapasitas jalannya tidak bertambah tetapi jumlah kendaraan meningkat, tetapi Dinas Perhubungan melakukan upaya dengan adanya kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dengan Sistem Satu Arah (SSA) di kawasan Dustira, yang meliputi Jl. Dustira, Jl. Baros, Jl. Sudirman, Jl. Urip Sumoharjo dan Segitita Contong.

3.1.3 Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target yang terdapat dalam dokumen renstra

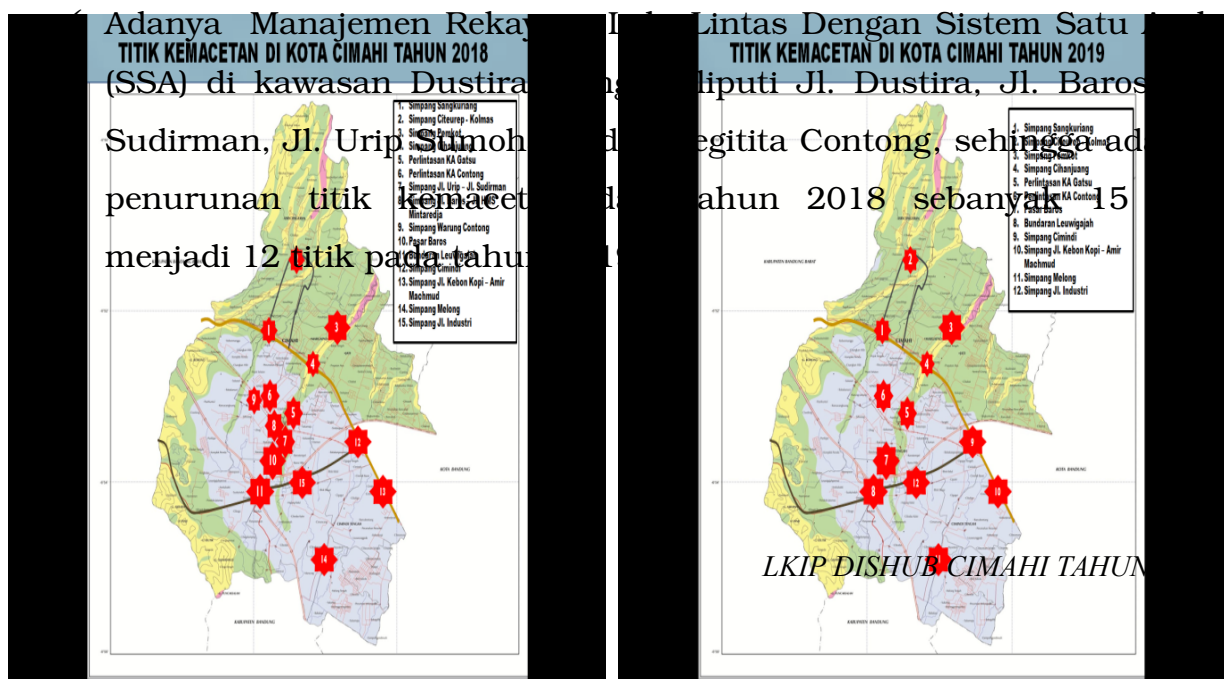
Indikator Kinerja	Target RPJMD 2017-2022	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian Kinerja 2019
Tingkat Kelancaran Lalu Lintas (VCR)	C	D	C	0.64

Target RPJMD 2017-2022 type pelayanan sudah tercapai yaitu C tetapi masih ada beberapa titik kemacetan di ruas-ruas jalan Kota Cimahi yang harus diupayakan lancar .

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dikarenakan sebagai berikut :

- ✓ Adanya pelebaran jalan di depan pusdik armed cimahi untuk meminimalisasi kemacetan yang kerap terjadi di jalan baros khususnya di depan pusdik armed
- ✓ Adanya pemekiharaan rambu-rambu lalu lintas dengan diaktifkannya kembali Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di persimpangan Baros depan Pusdikarmed sehingga dapat mengurai kemacetan lalu lintas.



(2018)

(2019)

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dengan terintegrasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDAs), Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem E-Reporting, Sistem E-Monev, dan Sistem E- Kinerja dalam pengintegrasian sistem / Aplikasi E-Government, maka akan lebih mempercepat proses kinerja Perangkat Daerah dalam penginputan data atau mengakses data, sehingga dapat mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi waktu.

Dengan adanya sistem E-Kinerja diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Aparatur Sipil Negara, serta meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

3.1.6.1 Capaian Kinerja Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja organisasi

No	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Lalu	Persentase fasilitas lalu lintas yang layak	Persen	80	32,32	40,4

	Lintas					
--	--------	--	--	--	--	--

Keterangan :

➤ Pengadaan Penerangan Jalan Umum

Kebutuhan Penerangan Jalan Umum dari tahun 2018-2022 sebanyak 17.081

Realisasi sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 3.606

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Kebutuhan}} \times 100\% = \frac{3.606}{17.081} \times 100\% = 21,11\%$$

➤ Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Kebutuhan Rambu-Rambu Lalu Lintas dari tahun 2018-2022 sebanyak 969

Realisasi sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 348

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Kebutuhan}} \times 100\% = \frac{348}{969} \times 100\% = 35,91\%$$

➤ Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Kebutuhan Pagar Pengaman Jalan dari tahun 2018-2022 sebanyak 789

Realisasi sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 241

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Kebutuhan}} \times 100\% = \frac{241}{789} \times 100\% = 30,54\%$$

➤ Pengadaan Marka Jalan

- Kebutuhan Marka Jalan dari tahun 2018-2022 sebanyak 47.797

Realisasi sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 14.647

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Kebutuhan}} \times 100\% = \frac{14.647}{47.797} \times 100\% = 30,64\%$$

- Kebutuhan Speed Bumper dari tahun 2018-2022 sebanyak 1.148

Realisasi sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 498

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Kebutuhan}} \times 100\% = \frac{498}{1.148} \times 100\% = 43,38\%$$

Persentase fasilitas lalu lintas yang layak, sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Persentase Pengadaan PJU} + \text{Rambu} + \text{Pagar} + \text{Marka} + \text{Speed Bumper}}{5}$$

= 32,32%

No	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
2	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	a. Persentase penurunan titik kemacetan	Persen	60	20	33,33
		b. Persentase Angkutan umum laik jalan	Persen	80	37,00	46,25

Keterangan :

2a. Adanya Penurunan titik kemacetan dari tahun 2018 sebanyak 15 titik menjadi 12 titik pada tahun 2019 (20%), merupakan hasil dari penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dengan Sistem Satu Arah (SSA) di kawasan Dustira, yang meliputi Jl. Dustira, Jl. Baros, Jl. Sudirman, Jl. Urip Sumoharjo dan Segitita Contong.

2b. Target Kendaraan Wajib Uji dari Tahun 2018-2022 sebanyak 51.000 kendaraan

Realisasi Kendaraan Wajin Uji sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 18.871 kendaraan.

Persentase Angkutan umum laik jalan :

$\frac{\text{Jumlah Kendaraan yang telah diuji}}{\text{Jumlah seluruh Kendaraan Wajib Uji}} \times 100\%$

$\frac{18.871 \text{ kendaraan}}{51.000 \text{ kendaraan}} \times 100\% = 37\%$

No	Nama Program	Indikator Program	Satuan	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
3.	Program Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum	a. Persentase Jaringan Jalan yang terlayani angkutan umum	Persen	70	51,58	73,67

		b. Presentase tersedianya halte dan terminal yang layak	Persen	72	91,30	126,81
--	--	---	--------	----	-------	--------

Keterangan :

3a. Panjang Jalan Kota = **118.873 m**

Panjang Jalan yang terlayani angkutan umum, sebagai berikut :

Nama Jalan	Panjang (m)	Nama Jalan	Panjang (m)
Jl. Raya Amir Machmud	4.320	Jl. Sangkuriang	1.470
Jl. Kebon Kopi	2.050	Jl. Encep Kartawiria	2.228
Jl. Industri/Cibaligo	6.019	Jl. Julaiha	355
Jl. Maharmartanegara	2.850	Jl. Cipageran	1.365
Jl. Kerkof	3.230	Jl. Melong	3.290
Jl. Nanjung	1.770	Jl. Gatot Subroto	2.220
Jl. Baros	1.420	Jl. Stasiun	535
Jl. HMS Mintaredja	1.500	Jl. Sisingamangaraja	1.215
Jl. Sudirman	1.130	Jl. Daeng Ardiwinata	2.800
Jl. Urip Sumoharjo	300	Jl. Rd. Demang	625
Jl. Dustira	525	Jl. Pesantren	2.019
Jl. Sadarmanah	1.750	Jl. Kamarung	1.533
Jl. Contong	380	Jl. Permana	1.045
Jl. Ibu Ganirah	3.130	Jl. Ciawitali	1.600
Jl. Lapangan Tembak	370	Jl. Jati	637
Jl. Gandawijaya	675	Jl. Aruman	722
Jl. Sriwijaya	815	Jl. Lurah	620
Jl. Gd. Empat	450	Jl. Kebon Cau	400
Jl. Kolonel Masturi	3.950		
Jumlah			61.313

Persentase Jaringan Jalan yang terlayani angkutan umum :

Jumlah Panjang Jalan yang terlayani angkutan umum × 100%

Jumlah Panjang Jalan Kota

$$\frac{61.313}{118.873} \times 100\% = 51,58\%$$

- 3b. Target Pembangunan Shelter sampai tahun 2022 sebanyak 23 shelter
Realisasi Pembangunan Shelter sampai dengan tahun 2019 sebanyak 21 Shelter, sebagai berikut :

N o	Lokasi	No	Lokasi
1	Jl.Amir Mahmud,(Depan Samsat Cimahi) Dibangun oleh pihak swasta	12	Jl.Sangkuriang, (Depan SMK Sangkuriang 2 Cimahi) 2014
2	Jl.Baros,(seberang Kecamatan Cimahi Selatan) Dibangun oleh pihak swasta	13	Jl.Encep Kartawirya,(Depan SDN Citeureup) 2014
3	Jl.Baros, (Depan Kecamatan Cimahi Selatan)	14	Jl.Mahar Martanegara (Depan SMKN 1 Cimahi) 2015
4	Jl.Baros, (Depan Puskesmas Cimahi Selatan)	15	Jl.Encep Kartawirya (Depan SMK Kesehatan Bhakti Kencana) 2015
5	Jl.Sriwijaya, (Depan SMAN 2 Kota Cimahi)	16	Jl.Sisingamangaraja (Belakang Cimahi Mall) 2017
6	Jl.Sriwijaya, (Depan Terminal Pasar Antri Baru)	17	Jl.Daeng M.Ardiwinata (Depan Es Cream Diamod) 2017
7	Jl.Stasion, (Depan Stasion Cimahi)	18	Jl.Cipageran(Depan SDN Cipageran) 2018
8	Jl.Gatot Subroto, (Depan SMAN 5 Cimahi)	19	Jl.Sriwijaya, (Depan Pasar Antri Baru) 2018
9	Jl. Gatot Subroto, (Depan SMPN 6 Cimahi)	20	Jl.Kolonel Masturi, (dekat jembatan) 2019
10	Jl.Sudirman, (Depan SDN Mandiri 5 Baros)	21	Jl.Sriwijaya, (Depan Pasar Antri Baru) 2019

11	Jl.Mahar Martanegara, (Depan SMKN 1 Cimahi) 2013		
----	--	--	--

Tersedianya terminal di Kota Cimahi sebanyak 1 terminal yaitu terminal cimindi, sampai dengan tahun 2019 belum adanya penambahan terminal

Presentase tersedianya halte yang layak

$$\frac{\text{Jumlah Shelter yang tersedia}}{\text{Jumlah Shelter yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

$$\frac{21}{23} \times 100\% = 91,30\%$$

3.1.6.2 Capaian Kinerja Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja organisasi

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan	Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan Traffic Counting	Jumlah Traffic Counting (TC) lalu lintas lebaran	1 dok	1 dok
		Pembahasan Kajian Analisis Dampak Lalu Lintas	Jumlah Pembahasan kajian analisis dampak lalu lintas	10 dok	10 dok
	Kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan Umum		Jumlah Terbangunnya Lampu Penerangan Jalan Umum	70 titik	69 titik
			Jumlah Terbangunnya Penerangan	262 titik	261 titik

			n Jalan Lingkunga n		
			Jumlah Terbangun nya PJU Gang	774 titik	774 titik
	Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum		Jumlah Terpelihar anya Lampu Peneranga n Jalan Umum	1000 titik	1000 titik
			Jumlah Terpelihar anya Peneranga n Jalan Lingkunga n	750 titik	750 titik
			Jumlah Terpelihar anya PJU Gang	600 titik	600 titik
	Kegiatan Pengadaan Rambu - rambu Lalu lintas		Jumlah Rambu- rambu Lalu Lintas	62 buah	62 buah
			Jumlah cermin tikung	50 buah	50 buah
			Jumlah RPPJ tiang F uk 120 cm x 240 cm	10 buah	10 buah
			Papan Nama Jalan	36 buah	36 buah
			Daun Rambu Uk 60cm x 60cm, Cermin Tikung dan RPPJ	1 ls	1 ls

			Uk 90cm x 120cm		
			Pemeliharaan Jalan	1 paket	1 paket
	Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan (Terpasangnya Pagar Pengaman Jalan)	52 m	52 m
	Kegiatan Pengadaan Marka Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan (Terpasangnya Marka jalan)	4450 M2	4450 m2
			Jumlah speed bumper	150 buah	150 buah
Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Kegiatan Penataan Sarana dan Prasarana Penunjang Perparkiran	Penegakan Hukum Ketertiban Parkir	Jumlah kegiatan gakum parkir	18 kali	18 kali
			Jumlah penertiban Parkir insidentil	5 kali	5 kali
		Monitoring Parkir	Jumlah monitoring parkir	6 kali	6 kali
		Sosialisasi Petugas Parkir	Jumlah sosialisasi petugas parkir	1 kali	1 kali
		Pemeliharaan Marka Parkir	Jumlah Pemeliharaan marka parkir	44 m2	44 m2
	Kegiatan Rekayasa Lalu Lintas	PAM Lalu Lintas Hari-hari Besar	Jumlah pengendalian lalu lintas idul fitri	1 kali	1 kali
			Jumlah	1 kali	1 kali

			pengendalian lalu lintas pada malam tahun baru		
			Jumlah pengendalian lalu lintas idul adha	1 kali	1 kali
			Jumlah pengendalian lalu lintas natal	1 kali	1 kali
		rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu	Jumlah pengendalian lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu	3 kali	1 kali
	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum dan Barang di Jalan Raya		Jumlah terlaksananya operasi penegakan hukum gabungan	12 kali	12 kali
			Jumlah operasi penegakan hukum di terminal	8 kali	8 kali
	Kegiatan Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Sub Kegiatan Inspeksi Angkutan	Jumlah Inspeksi angkutan (Rampcheck)	6 kali	6 kali
		Sub Kegiatan Cek	Jumlah Cek kesehatan	150 org	150 org

		Kesehatan Pengemudi	pengemudi angkutan umum yang terlaksana		
		Sub Kegiatan Sosialisasi Angkutan	Jumlah Sosialisasi Angkutan	1 kali	1 kali
	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Pemantau Kemacetan		Jumlah Terpeliharanya CCTV	1 paket	1 paket
			Jumlah Tersedianya spare part CCTV	1 paket	1 paket
	Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu lintas	Sosialisasi keselamatan berlalu lintas	Jumlah sosialisasi keselamatan berlalu lintas	10 kali	10 kali
		Safety Riding	Jumlah Safety Ridding siswa SMA	1 kali	1 kali
		Lomba Cerdas Cermat	Jumlah lomba cerdas cermat tingkat pelajar	1 kali	1 kali
	Kegiatan Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan		Jumlah dokumen Kajian Perencanaan Rekayasa Jembatan Double Track Leuwigajah	-	-
			Jumlah dokumen kajian penataan	1 dok	1 dok

			perparkiran se Kota Cimahi		
	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Stransportasi Guna Keselamatan Penumpang		Jumlah kendaraan wajib uji	5.100 x2= 10.200 kendaraan wajib uji	9.347
			Jumlah dokumen laporan bulanan	25 dok	25 dok
	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor		Jumlah peralatan uji PKB yang dipelihara	11 unit	10 unit
	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana / Balai Pengujian Kendaraan Bermotor		Jumlah bulan gedung PKB yang terpelihara	12 bulan	12 bulan
Program Peningkatan Pelayanan Dan Sarana Prasarana Angkutan	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Mudik Gratis Lebaran	Jumlah orang Terlaksananya mudik gratis lebaran	750 orang	750 orang
		Uji Coba Trayek Baru	Jumlah Terlaksananya uji coba Pengembangan Trayek Perkotaan	5 kali	5 kali
	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan		Jumlah bulan sewa	12 bulan	12 bulan

	Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal		terminal		
			Jumlah bulan terselenggara pengelolaan terminal	12 bulan	12 bulan
			Jumlah bulan pembayaran THL Terminal	12 bulan	12 bulan
	Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Angkutan	Lomba Tertib Lalu Lintas (WTN)	Jumlah lomba tertib lalin	1 kali	-
		Forum Lalu Lintas	Jumlah forum lalu lintas tingkat kota cimahi	12 kali	7 kali
		Pekan keselamatan berlalu lintas	Jumlah terlaksananya pekan keselamatan berlalu lintas	1 kali	1 kali
	Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan		Jumlah Terminal Angkutan Darat Tipe C yang dipelihara	1 paket	1 paket
	Kegiatan Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Pengadaan Shelter/Halte	Jumlah shelter / halte yang dibangun	2 buah	2 buah
		Pemeliharaan Shelter/Halte	Jumlah shelter / halte yang dipelihara	4 buah	4 buah

Pencapaian Indikator Program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi pada tahun anggaran 2019, rata-rata mencapai 95,64% sehingga dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja organisasi karena pada program tersebut terdapat kegiatan yang merupakan sektor perhubungan untuk meningkatkan kelancaran dan keselamatan berlalu lintas, diantaranya :

1. Implementasi Pemasangan Rambu, Marka, Pagar dan Penerangan Jalan Umum

Salah satu upaya yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam menciptakan transportasi yang aman, nyaman dan selamat adalah melalui pemasangan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu, marka, pagar, penerangan jalan umum, dan lain sebagainya. Para pengguna jalan harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi terlaksananya kelancaran dan keselamatan berlalu lintas. Dengan adanya Penerangan Jalan Umum sebagai bagian dari infrastruktur kota, seluruh jaringan jalan yang ada di Kota Cimahi perlu dilengkapi alat kelengkapan jalan yang memadai. Kondisi ini merupakan sebuah tantangan bagi pemerintahan Kota Cimahi dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, khususnya para pengguna jalan dalam rangka menciptakan transportasi yang aman, nyaman dan selamat.

2. Sektor Perparkiran

Pengguna jalan atau pengguna kendaraan dilarang parkir sembarangan supaya tidak terjadi kemacetan jika ada yang parkir liar ada tindakan dari dinas perhubungan seperti adanya kegiatan Gerakan penertiban perparkiran

3. Sektor Pengawasan & Pengendalian Angkutan Umum

Adanya operasi penegaksn hokum angkutan umum di jalan raya,penertiban angkot yang tidak memiliki izin trayek dan uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpang

4. Sektor Pengujian Kendaraan Bermotor

Kendaraan Angkutan Umum diwajibkan melakukan wajib uji untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan.

5. Sektor Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Adanya pengalihan arus lalu lintas dari dua arah menjadi satu arah pada ruas tertentu dan jam tertentu yang mengalami kemacetan guna mengurangi kemacetan.

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

Sumber-sumber Anggaran Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2019 adalah terdiri dari Pengelolaan Anggaran Pendapatan, Pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pengelolaan Anggaran Belanja Langsung.

Sumber Anggaran Pendapatan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi adalah retribusi, yang terdiri dari :

1. Retribusi Parkir
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Retribusi Terminal
4. Retribusi Ijin Usaha Angkutan Umum

TABEL 3.1
TARGET DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JENIS PENDAPATAN	Target PAD Rp.	Realisasi Rp.	%
1	Retribusi Parkir	699.800.000	718.769.000	102,71
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	679.330.960	700.174.050	103,07

3	Retribusi Terminal	150.002.000	130.669.000	87,11
4	Retribusi Ijin Usaha Angkutan	31.500.000	16.200.000	51,43
Jumlah		1.560.632.960,00	1.565.812.050,00	100,33

Rincian anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini

TABEL 3.2
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI
TAHUN 2019

No.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.659.410.000,-	9.340.767.646,-	96,70
	Gaji dan Tunjangan	4.176.792.000,-	4.031.432.646,-	96,52
	Tambahan Penghasilan PNS	5.482.618.000,-	5.309.335.000,-	96,84
II	BELANJA LANGSUNG	28.672.195.000	24.893.442.640	86,82
I	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS	12.405.816.350	11.318.515.645	91,24
1	perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	69.600.000	62.487.000	89,78
2	pengadaan penerangan jalan umum	6.577.894.350	6.130.488.070	93,20
3	pemeliharaan penerangan jalan umum	3.379.546.000	3.124.210.560	92,44
4	pengadaan rambu-rambu lalu lintas	840.270.000	738.191.700	87,85
5	pengadaan pagar pengaman jalan	75.050.000	69.858.000	93,08
6	pengadaan marka jalan	1.463.456.000	1.193.281.315	81,54
II	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	2.535.239.500	2.161.796.465	85,27
7	penataan sarana dan prasarana penunjang parkir	252.202.000	219.376.000	86,98
8	rekayasa lalu lintas	424.998.000	299.311.880	70,43
9	pengendalian disiplin pengoprasi angkutan umum di jalan raya	340.551.000	313.071.750	91,93
10	Penyuluhan bagi para sopir/juru	162.390.000	152.226.350	93,74

	mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang			
11	pengadaan dan pemeliharaan alat pemantau kemacetan	176.000.000	147.094.833	83,58
12	sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	398.004.000	300.261.000	75,44
13	penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	57.094.500	50.249.500	88,01
14	uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	275.000.000	261.160.676	94,97
15	rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	202.800.000	182.706.900	90,09
16	rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	246.200.000	236.337.576	95,99
III	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN SARANA PRASARANA ANGKUTAN	1.795.577.682	1.559.740.071	86,87
17	pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	425.260.000	375.958.132	88,41
18	penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	947.100.000	882.680.574	93,20
19	rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	100.000.000	94.085.615	94,09
20	koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	166.857.000	54.321.000	32,56
21	pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	156.360.682	152.694.750	97,66
IV	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	11.262.115.350	9.358.122.364	83,09
22	penyediaan alat tulis kantor	60.734.000	53.561.250	88,19
23	penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	8.184.311.150	7.344.002.635	89,73
24	penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan	714.044.000	468.310.200	65,59
25	pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas	1.478.505.000	801.653.245	54,22
26	pengadaan dan pemeliharaan meubeleur kantor	28.500.000	5.558.000	19,50
27	pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor	173.850.000	101.749.175	58,53

28	penyediaan gudang kantor	127.812.000	123.990.000	97,01
29	penyediaan peralatan rumah tangga	3.450.000	2.895.000	83,91
30	penyediaan makanan dan minuman	46.320.000	33.160.000	71,59
31	koordinasi dan konsultasi kedinasan	360.000.000	343.918.089	95,53
32	penyediaan jasa kebersihan kantor	84.589.200	79.324.770	93,78
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	327.596.200	290.502.095	88,68
33	penyusunan anggaran perangkat daerah	56.007.500	55.185.000	98,53
34	penyusunan laporan keuangan	66.192.100	62.477.600	94,39
35	penyusunan renstra dan renja PD	98.782.150	70.613.650	71,48
36	penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, LKIP dan LPPD PD	106.614.450	102.225.845	95,88
VI	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	345.849.918	204.765.000	59,21
37	pengembangan kapasitas sumberdaya pegawai	345.849.918	204.765.000	59,21
	Jumlah	28.672.195.000	24.893.442.640	86,82

BAB IV

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dinas Perhubungan Kota Cimahi pada tahun 2019 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pelaksanaan pertanggungjawaban kinerja serta keuangan disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2019. Tujuan dari penyusunan dokumen tersebut

adalah untuk mengetahui sejauh mana kualitas dan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi sehingga akan memudahkan dalam proses pengendalian dan evaluasi instansi pemerintah.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Cimahi pada tahun 2019 secara keseluruhan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran dikelola dengan seefisien mungkin sehingga terdapat beberapa penghematan dalam pengeluaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

5.2 PERBAIKAN KEDEPAN

Dinas Perhubungan sudah melakukan pengawasan dan pengendalian sistem transportasi melalui sektor sarana dan prasarana yang akan dilakukan untuk perbaikan kedepannya adalah Implementasi Pemasangan Rambu, Marka, Pagar dan Pengadaan Penerangan Jalan Umum

Dampak Positif :

- Pengalihan Arus
- Tata tertib berlalu lintas
- Keselamatan Lalu Lintas

Sektor Perparkiran

Dampak Positif :

- Penataan Lahan/Ruang Parkir
- Kendaraan yang melakukan parkir liar ada tindakan

Sektor Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Umum

Dampak Positif :

- Monitoring angkutan umum dilaksanakan untuk menertibkan dan menata angkutan umum yang selanjutnya diupayakan agar masyarakat beralih menggunakan angkutan umum yang layak untuk mengurangi kemacetan

Sektor Pengujian Kendaraan Bermotor

Dampak positifnya :

Inventaris kendaraan wajib uji untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan

RENCANA AKSI KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				PROGRAM		TARGET				KEGIATAN				TARGET				
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW I	TW II	TW III	TW IV	Program	Indikator Program	TW I	TW II	TW III	TW IV	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4				5	6	7				8		9	10		11			
	Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas	Tingkat Kelancaran Lalu Lintas (VCR)				D	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS	Presentasi Fasilitas Lalu Lintas yang layak				85%	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan Traffic Counting	Jumlah Traffic Counting (TC) lalu lintas lebaran	1	dok		1 dok		
															Jumlah TC 10 ruas jalan Kota	1	dok	1 dok			
														Sub Kegiatan Pembahasan Kajian Analisis Dampak Lalu Lintas	Jumlah Pembahasan kajian analisis dampak lalu lintas	12	dok	3 dok	3 dok	3 dok	
													Kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan Umum		Terbangunnya Lampu Penerangan Jalan Umum	47	titik		47 titik		
															Terbangunnya Penerangan Jalan Lingkungan	59	titik		59 titik		
															Terbangunnya PJU Gang	995	titik		995 titik		
													Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum		Terpeliharanya Lampu Penerangan Jalan Umum	900	titik	300 titik	300 titik	200 titik	
															Terpeliharanya Penerangan Jalan Lingkungan	600	titik	200 titik	200 titik	100 titik	
															Terpeliharanya PJU Gang	600	titik	200 titik	200 titik	100 titik	
													Kegiatan Pengadaan Rambu - rambu Lalu lintas		Jumlah Rambu-rambu Lalu Lintas	68	buah		68 buah		
															Jumlah cermin tikung	10	buah		10 buah		
															Jumlah RPPJ	10	buah		10 buah		
															Daun Rambu, Cermin Tikung dan RPPJ	1	LS		1 LS		

												Jumlah Pengadaan Traffic Light	1	paket		1 paket				
											Kegiatan Pengadaan Marka Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan (Terpasangnya Marka jalan)	1.190	m2	1.190					
												Jumlah speed bumper	40	buah	40					
						PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Presentase Penurunan Titik Kemacetan			50%	Penataan Sarana dan Prasarana Penunjang Perparkiran	Jumlah kegiatan gakum parkir	6	kali	2 kali	1 kali	2 kali	1 kali		
											Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketertiban Parkir	Jumlah penertiban Parkir kegiatan insidental	5	kali		2 kali	2 kali	1 kali		
											Sub Kegiatan Monitoring Parkir	Jumlah monitoring parkir	6	kali	2 kali	1 kali	1 kali	2 kali		
											Sub Kegiatan Sosialisasi Petugas Parkir	Jumlah sosialisasi petugas parkir	1	kali	1 kali					
											Sub Kegiatan Pemeliharaan Marka Parkir	Jumlah Pemeliharaan marka parkir	100	m2	100 m2					
											Sub Kegiatan Pemeliharaan Papan Tarif Parkir	Jumlah Pemeliharaan Papan Tarif Parkir	40	unit	40 unit					
											Sub Kegiatan Pengadaan Papan Tarif Parkir	Jumlah Pengadaan Papan Tarif Parkir	3	buah	3 buah					
											Kegiatan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah PAM lalu lintas idul fitri	1	kali		1 kali				

[illegible]

												Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu lintas	Sub Kegiatan Sosialisasi keselamatan berlalu lintas	Jumlah sosialisasi keselamatan berlalu lintas	10	kali	2 kali	3 kali	3 kali	2 kali	
													Sub Kegiatan Safety Riding	Jumlah Safety Ridding siswa SMA	1	kali		1 kali			
													Sub Kegiatan Lomba Cerdas Cermat	Jumlah lomba cerdas cermat tingkat pelajar dan guru	1	kali			1 kali		
											Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan			Jumlah paket dokumen penyusunan draf Perda Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1	paket	1 paket				
											Jumlah paket dokumen Perencanaan Alat Kelengkapan Jalan		1	paket	1 paket						
											Presentase Angkutan Umum Laik Jalan	85%	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Stransportasi Guna Keselamatan Penumpang	Jumlah kendaraan wajib uji	5.100 x 2= 10.200	kendara an wajib uji				5.100 x 2= 10.200 kendara an wajib uji	
														dokumen laporan bulanan	25	dok	6 dok	6 dok	6 dok	7 dok	
												Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor		Jumlah peralatan uji PKB yang dipelihara	11	unit				11 unit	
												Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana / Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Sub Kegiatan Pemeliharaan Gedung PKB	Jumlah bulan gedung PKB yang terpelihara	12	bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	
													Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kantor Lainnya	Jumlah Pengadaan CCTV	6	unit			6 unit		

											Jumlah Pengadaan DVR	1 unit			1 unit		
											Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Studio Audio	Jumlah Pengadaan Intermedia	1 paket		1 paket		
						PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN SARANA PRASARANA ANGKUTAN	Presentase Jaringan Jalan yang terlayani angkutan umum			75%	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Sub Kegiatan Mudik Gratis Lebaran	Jumlah orang Terlaksananya mudik gratis lebaran	650 orang	650 orang		
											Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal		Jumlah bulan sewa terminal	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan
													terselenggaranya pengelolaan terminal	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan
													Jumlah bulan pembayaran THL Terminal	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan
											Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Angkutan	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas	Jumlah forum lalu lintas tingkat kota cimahi	10 kali	3 kali	3 kali	1 kali
							Presentase Tersedianya Halte dan Terminal yang layak			85%	Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan		Jumlah Jasa Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Gedung Terminal	1 paket	1 paket		
													Jumlah Pemeliharaan Gedung Terminal	1 paket	1 paket		
													Jumlah Jasa Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan Gedung Terminal	1 paket	1 paket		

						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR	Presentase sarana dan prasarana yang dipelihara				100%	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah bulan penyediaan ATK	12	bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan		
												Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah biaya Jasa Komunikasi dan Listrik	12	bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan		
												Kegiatan Penyediaan Media Massa, barang cetakan dan penggandaan		Jumlah biaya media massa	12	bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan		
														Jumlah bulan penggandaan	12	bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan		
														Jumlah bulan cetakan	12	bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan		
												Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas		Jumlah proteksi kendaraan dinas	20	unit	14 unit				6 unit	
														Jumlah bulan Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	20	unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit		
												Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor		Jumlah bulan belanja alat listrik dan elektronik	6	bulan	1 bulan	2 bulan	2 bulan	1 bulan		
														Jumlah pemeliharaan komputer	1	paket					1 paket	
														Jumlah pemeliharaan laptop	1	paket					1 paket	
														Jumlah pemeliharaan printer	1	paket					1 paket	
														Jumlah pemeliharaan AC	1	paket					1 paket	
														Jumlah pemeliharaan barang elektronik	1	paket					1 paket	
												Kegiatan Penyediaan Gudang Kantor		Jumlah Sewa Gudang	1	tahun	1 tahun					

												Jumlah Sewa Gudang PJU	2	tahun		2 tahun			
											Kegiatan penyediaan jasa jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	Jumlah bulan pembayaran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan thl	12	bln	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	
											Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan dan minuman rapat	12	bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	
						Presentase Koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi			100%		Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan	Jumlah bulan perjalanan dinas	12	bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	
											Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan jasa penyediaan kebersihan kantor	12	bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	
												Jumlah bulan penyediaan peralatan kebersihan	12	bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	
						PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DA KEUANGAN	Presentase Realisasi Anggaran		85%		Kegiatan Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dok DPA dan DPPA, dok RKA dan RKAP	4	dok			2 dok	2 dok	
											Kegiatan penyusunan laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1	dok			1 dok		
												Jumlah Laporan Realisasi Keuangan	7	laporan	2 lap	2 lap	2 lap	1 lap	
												Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	dok				1 dok	
						Nilai SAKIP			75 indeks		Penyusunan Renstra dan Renja PD	Jumlah Renja	1	dok				1 dok	
												Jumlah Evaluasi Renja	1	dok				1 dok	

RENCANA KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas	Tingkat Kelancaran lalu lintas (VCR)	D

Cimahi, Januari 2020
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIMAHI



Drs. YANUAR TAUFIK, M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19640121 199102 1 003